

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bagian menimbang huruf (a) yaitu bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselamatan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk di sektor ekonomi dan keuangan. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 52,76 juta unit (BPS,2009). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 tersebut juga menunjukkan bahwa UMKM terbukti berkontribusi sebesar 56,92% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp1.213,25

Triliun. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja (menyerap 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja) dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia serta kontribusi yang cukup besar terhadap investasi di Indonesia yaitu sebesar Rp222,74 Triliun atau 51,80% dari total investasi pada tahun 2008.¹ Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, namun juga karena pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Adanya kebijakan dan dukungan yang lebih besar baik dari pemerintah maupun para pelaku ekonomi seperti kemudahan dalam akses permodalan, kebijakan pemerintah, perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan, diharapkan UMKM dapat berkembang pesat serta dapat bersaing sehat di tengah bebasnya pasar yang terjadi saat ini. Selain itu, UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan sehingga terciptanya persaingan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang baik.

¹Bank Indonesia, *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia* h. 1.

UMKM dalam menjalankan kegiatannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan usahanya, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal seperti; modal, jaringan usaha, SDM, dan lain-lain yang merupakan sumber daya bagi produksi barang dan jasa suatu perusahaan. Lingkungan eksternal seperti; iklim usaha yang kondusif, akses modal, dan kebijakan pemerintah, yang merupakan faktor pendukung kegiatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Pengelolaan lingkungan internal dan eksternal yang baik akan menjadikan perusahaan mampu bersaing dan meningkatkan kinerjanya.²

Kendala internal terutama berkaitan dengan kecukupan modal usaha, pemasaran dan kualitas sumber daya manusia. Kurangnya permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha

² Mohammad Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. (Infokop no 25 2004), h. 40-44.

tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

UMKM yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Kendala eksternal berkaitan dengan seperti akses modal dan informasi tentang akses modal itu sendiri serta kebijakan pemerintah, yang merupakan faktor pendukung kegiatan dari usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dalam pengembangan usahanya mengalami permasalahan dengan memenuhi modal. Dalam memenuhi kebutuhan dana lebih banyak mengandalkan pada pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya salah satunya dengan kredit. Namun untuk mendapatkan kredit bukan merupakan hal yang mudah bagi usaha mikro kecil dan menengah, hal itu disebabkan faktor persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit. Selain itu juga banyak yang belum mengetahui bagaimana mendapatkan pinjaman. Hal itu disebabkan karena informasi yang kurang memadai. Selain itu juga ada perbedaan pandangan antara usaha skala kecil dan pihak pemberi kredit, ini menambah adanya hubungan yang tidak baik antara keduanya. Usaha mikro kecil dan

menengah ingin dana itu segera di dapat untuk kepentingan yang mendesak saat itu disisi lain bank atau lembaga keuangan lainnya tidak bias memberikannya, hal itu disebabkan karena unsur persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kredit dan menyakinkan pemberi kredit apakah nantinya dapat mengangsur atau tidak. Namun demikian jika sudah saling percaya antara keduanya untuk mendapatkan kredit dengan segera itu dapat dipenuhi.³

Selama ini terkesan berbagai kebijakan lebih berpihak kepada sektor usaha besar, sehingga berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah sebagian besar dinikmati oleh sektor usaha besar. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih berada pada rentang perjalanan yang panjang, bertolak pada kenyataan inilah maka eksistensi industri kecil telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenaga kerjaan di negara-negara berkembang. Peranan industri kecil tersebut antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah atau negara, penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan barang-barang masyarakat dan penyerapan tenaga kerja setempat.

Menurut bapak Sri Tody Kurnianto selaku sekertaris umum Koperasi industri kayu dan mebel (KIKM) Jakarta Timur sebagian besar dari anggota yang tergabung dalam KIKM mengalami masalah dalam mengembangkan usahanya seperti halnya dalam pemasaran para anggota ini hanya

³ *Ibid*

mengandalkan satu web saja untuk promosi produknya padahal jika masing-masing anggota dapat mengelola web sendiri untuk promosi produknya, dapat diramalkan penjualan produknya akan meningkat. Pengelolaan yang dilakukan oleh para anggota juga dinilai kurang oleh bapak Tody, misalnya masih banyak anggota yang belum mengerti tentang pengelolaan keuangan ataupun pembukuan keuangan.

Berdasarkan wawancara kepada tiga anggota yang dilakukan oleh peneliti didapatkan kesimpulan yang hampir sama yaitu kebutuhan modal bagi ketiga anggota KIKM itu sangat penting dikarenakan untuk membeli bahan baku bagi barang produksinya. Sebab untuk membuat sebuah mebel yang terbuat dari bahan kayu, bahan baku kayunya harus terlebih dahulu dijemur sekitar 1 bulan jika musim panas. Jadi ketika pelanggan memesan model barang yang diinginkan dapat segera dibuat dari bahan baku yang telah dijemur tersebut. namun untuk membeli bahan baku membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karna itu dibutuhkan akses untuk peminjaman modal bagi anggota ini tentunya akses dari lembaga resmi yang mampu memberikan bunga pinjaman yang kecil dan memiliki persyaratan bagi anggota dengan jaminan yang tidak begitu besar pula. Para anggota yang dapat memenuhi pesanan pelanggan dapat dikatakan usahanya berkembang.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan mengulas permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul : **Pengaruh Kualitas Akses Modal Bank Tabungan Nasional Terhadap Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada Anggota Koperasi Industri Kayu dan Mebel Jakarta Timur)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas maka dapat dikemukakan identifikasi masalahnya antara lain :

1. Masalah Internal

- a. Adakah modal berpengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM pada anggota Koperasi industri kayu dan mebel di Jakarta Timur ?
- b. Adakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM pada anggota Koperasi industri kayu dan mebel di Jakarta Timur ?
- c. Adakah pemasaran berpengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM pada anggota Koperasi industri kayu dan mebel di Jakarta Timur?

2. Masalah Eksternal

- a. Adakah kualitas akses modal Bank Tabungan Nasional berpengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM anggota Koperasi industri kayu dan mebel di Jakarta Timur ?

- b. Adakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM pada anggota Koperasi industri kayu dan mebel di Jakarta Timur ?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan berbagai masalah yang diidentifikasi peneliti hanya membatasi masalah pada : Pengaruh Kualitas Akses Modal Bank Tabungan Nasional Terhadap Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah pada anggota Koperasi industri kayu dan mebel di Jakarta Timur.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah terdapat Pengaruh Kualitas Akses Modal Bank Tabungan Nasional Terhadap Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah pada anggota Koperasi industri kayu dan mebel di Jakarta Timur ?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kaitannya dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Memberikan bahan yang bermanfaat bagi mahasiswa UNJ yang ingin meneliti mengenai kualitas akses modal Bank Tabungan Nasional terhadap pengembangan usaha UMKM

b. Bagi Anggota KIKM

Memberikan informasi mengenai pengaruh akses kredit dan kualitas informasi kredit terhadap pengembangan usaha UMKM serta sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan anggota.